Journal I La Galigo : Public Administration Journal P-ISSN: 2654-4776
Volume 4 Nomor 2 Oktober 2021 E-ISSN:2684-9933

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA MASYARAKAT DI DESA MARANNU KABUPATEN MAROS

Rasdiana[1], Isnah HH[2]

[1]Universitas Muhammadiayah Makassar
email: rasdianaras@unismuh.ac.id

[2]Universitas Muhammadiyah Makassar
email: isnahhamzah@gmail.com

Abstrak

Kinerja suatu organisasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi itu sendiri. Kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai dinilai memiliki permasalahan terkait data yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan menjelaskan kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data, observasi langsung ke lokasi, melakukan wawancara dengan beberapa informan, dan dokumentasi. Untuk teknik pengelolaan data, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman yaitu: Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros belum sepenuhnya menunjukkan kinerja yang maksimal karena dari aspek akuntabilitas, ada data yang tidak valid sebab menggunakan data tahun 2017 sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai ada yang tidak menerima bantuan social. Data lama tersebut berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, namun Dinas Sosial Kabupaten Maros seharusnya tidak berpatokan dengan data lama dan Dinas seharusnya menyiapkan data terbaru terkait bantuan social agar penyaluran bantuan bisa merata.

Kata kunci: Kinerja Organisasi, dan Bantuan Sosial Tunai

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pelayanan publik dan program-program yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa "Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak.". Pemerintah memerlukan suatu system penilaian dalam melaksanakan programnya guna mencapai sasaran yang dilaksanakan berdasarkan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengukuran kinerja dimana dalam melakukannya harus dengan pertimbangan berbagai aspek, agar aspek dapat berjalan dengan efektif dalam organisasi tersebut.

Mangkunegara dalam (Huti, 2020) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan baik itu hasil secara kualitas maupun kuantitas. Terkait dengan teori kinerja diatas Rummler dan Brache mengemukakan bahwa terdapat tiga level dalam kinerja yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu/ pekerjaan. Kinerja organisasi yaitu pencapaian yang diperoleh organisasi tersebut berada pada tingkat atau level yang sesuai dengan rancangan organisasi, manajemen organisasi serta tujuan organisasi (Bintang & Widowati, 2017). Selain itu kinerja organisasi dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan ketika program yang telah dibuat terlaksana secara optimal dengan hasil yang memuaskan (Rahajeng, 2018). Keberhasilan suatu organisasi/tidak lepas dari kinerja yang baik dari anggota organisasi tersebut, baik dari kinerja individu maupun dari kinerja tim (Sulfiani,Andi Ni'mah, 2019)

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah salah satunya adalah pelayanan masyarakat dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan rentan terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Statistik, 2020). Di Indonesia Corona Virus Diseas 2019 muncul sejak awal tahun 2020 yang membawa dampak negative terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama di aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Persentase penduduk miskin di Indonesia sejak bulan Maret 2020 meningkat sebanyak 0,37% bila dibandingkan dengan bulan maret 2019 Menurut BPS dalam (Muthiah, 2021). Selain itu pula, pada Triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang mengalami kontraksi yaitu sebesar 5,32% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II ditahun 2019. Padahal persentase jumlah kemiskinan di Indonesia pada September 2015 sampai dengan September 2019 secara berturut-turut sudah mengalami penurunan. Dengan adanya kondisi tersebut yang mendorong pemerintah agar memberikan dan menjalankan berbagai kebijakan atau program dalam rangka memberikan jaring Pengaman Sosial (JPS) terkhusus bagi masyarakat yang sedang terdampak Covid-19.

Berkaitan dengan kinerja Pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau, masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat terkait proses penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Dimana kinerja pegawai dinilai tidak transparan dalam pengelolaan data dari desa dan kelurahan mengenai warga yang terdampak Covid-19, masyarakat meminta pemerintah selayaknya lebih proaktif dalam bekerja dan tidak membuat masyarakat semakin marah mengenai persoalan tidak valid nya data sebagaimana data yang diserahkan kepada desa dan kelurahan sangat berbeda dengan data dari Dinas Sosial sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa data tersebut tidak diperbaharui apabila Dinas Sosial Kabupaten Maros berpatokan pada data yang notabene merupakan hasil rekap pada tahun 2017.

Berhubungan dengan masalah diatas maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dinas social dalam penyaluran bantuan social tunai di Desa Marannu Kabupaten Maros**.** Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang digunakan yaitu Miles and Huberman (Barlian, 2016) reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak covid-19. Salah satu desa penerima manfaat bantuan sosial tunai ini adalah Desa Marannu Kabupaten Maros, penyaluran dana bantuan sosial tunai tersebut diberikan secara bertahap disetiap bulannya. Meskipun BST tersebut programnya diberikan untuk setiap bulannya namun terkadang Bantuan Sosial Tunai tersebut diberikan untuk dua bulan bahkan tiga bulan sekaligus dilihat berdasarkan situasi apakah covid-19 masih ada. Terdapat beberapa tahap yang diberikan langsung untuk jangka waktu tiga bulan seperti pada tahun 2020 diberikan pada bulan Juni – Agustus, September - November dan seterusnya. Sementara di tahun 2021 bantuan tersebut terakhir diberikan untuk jangka waktu Juni – Juli.

Pandemi covid-19 di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai sekarang, pada tahun 2020 bantuan sosial tunai diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Maros sekitar 14.000 KPM namun di tahun 2021 penerima bantauan BST di Kabupaten Maros sekitar 9.000 KPM. Hal itu tentusaja mengalami penurunan yakni sebanyak 5.000 KPM terdampak covid-19 yang tidak lagi memperoleh BST. Sementar untuk di Desa Marannu jumlah penerima bantuan sosial tunai yaitu sebanyak Rp 300.000-,/bulan/KK pada tahun 2020 sebanyak 150an KPM yang juga mengalami penurunan ditahun 2021 ini BST diberikan hanya sekitar 90 an KPM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel : Penerima BST Desa Marannu Kecamatan Lau Tahap 1-13

NO	Tahap Penyaluran	Penerima BST di Desa Marannu			Total
		Dusun Marana	Dusun Kalokko	Dusun Kokoa	
1	Tahap 1	78	58	17	152
2	Tahap 2	79	58	17	153
3	Tahap 3	66	48	13	127
4	Tahap 4 dan 5	78	58	14	149
5	Tahap 6	53	44	12	109
6	Tahap 7	53	44	12	109
7	Tahap 8	53	44	12	109
8	Tahap 9	53	44	12	109
9	Tahap 10	50	27	8	85
10	Tahap 11	51	40	8	99
11	Tahap 12 dan 13	50	39	8	97

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima BST mengalami penurunan dari tahap ke tahap dimana jumlah penerima bantuan sosial tersebut berada pada tahap ke 2 yaitu sebanyak 153 KPM dan jumlah penerima terendah berada pada tahap 10 yaitu 85 KPM. Berbeda dari pembagian tahap sebelumnya yang mana program yang diberikan hanya Bantuan Sosial Tunai saja namun pada pembagian di tahap 12-13 BST diberikan bersamaan dengan beras 10 kg yang membuat masyarakat semakin merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Sebagaimana dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai melalui berbagai tahapan yang mana Dinas Sosial tidak sendiri dalam melaksanakan penyaluran melainkan juga dilakukan oleh beberapa pihak salah satunya PT Pos yang merupakan penyalur utama yang tugaskan langsung oleh PT Pos Indonesia yang kerja sama dengan Kementerian Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros terkait kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros yang dilihat berdasarkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. .

1. Produktivitas

Produktivitas bukan hanya mengukur efisien tidaknya suatu kinerja, namun juga berhubungan dengan aktivitas organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kinerja organisasi Dina Sosial Kabupaten Maros, produktivitas kerja yang diberikan merupakan salah satu acuan tercapai tidaknya suatu target atau rencana yang telah ditentukan. Tingkat pencapaian produktivitas di kantor Dinas Sosial Kabupaten maros dalam menyalurkan dana BST kepada masyarakat di Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros seluruhnya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam penyaluran bantuan sosial ini dilakukan semaksimal mungkin agar dalam pelaksaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya kerjasama antara pihak dari PT pos, Aparat sipil seperti kepolisian dari polres maros dan Satpol PP, sinas sosial, kecamatan, Desa, dan seluruh masyarakat penerima bantuan sosial tunai atau yang biasa disebut BST ini sehingga berjalan dengan tertib dan lancar yang mana penyalurannya dilakukan mulai sejak awal pandemi covid-19.

2. Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan yang diberikan dapat menunjukkan sejauh mana mutu pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu Kualitas layanan dalam melakukan pekerjaan bisa dilihat sejauh mana hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan usah-usaha apa saja yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten kepada masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur yang berperan dalam menangani segala kebutuhan yang diperlukan saat melakukan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) terlebih dimasa pandemi covid-19. Selain itu, bagaimana aparatur Dinas Sosial Kabupaten Maros dapat mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat dalam rangka memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi.

3. Responsivitas

Responsivitas menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu organisasi dikarenakan secara langsung memberikan gambaran kemampuan organisasi publik dalam menjalankan visi dan misi dan sesuai dengan tujuannya terutama dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat publik merupakan tugas dari suatu organisasi publik, memberikan layanan yang baik kepada masyarakat juga merupakan tanggung jawab setiap pegawai. Sementara kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting bagi pelayanan yang diberikan suatu organisasi, hal tersebut dikarenakan hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi organisasi publik. Oleh karena itu setiap organisasi wajib merespon secara cepat agar tidak terjadi ketertinggalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberhasilan suatu organisasi publik jika diukur berdasarkan tingkat Responsivitas maka program-program pelayanan yang dilaksanakan harus selaras dengna kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat memberikan pandangan yang baik terhadap pelayanan yang diberikan.

Responsivitas dinas Sosial dalam proses kegiatan penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat di desa Marannu Kecamatan Lau

Kabupaten Maros sudah sangat baik dengan melayani masyarakat baik yang datang secara langsung ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros maupun melalui TKSK untuk menyampaikan apa yang hendaknya diadukan dan yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga dapat ditangani dengan segera.

Meskipun demikian pada saat kegiatan penyaluran dilakukan baik oleh Dinas Sosial, Pos dan yang lainnya memberikan rasa puas kepada masyarakat dengan pelayanan dan cara petugas memperlakukan penerima dengan sangat baik sehingga para penerima merasa nyaman dan merasa tidak tertekan selama proses penyaluran berlangsung. Dengan hal demikian yang menjadikan penyaluran dana bantuan sosial tunai ini kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tujuan Dinas Sosial.

4. Responsibilitas

Pelaksanaan kegiatan organisasi publik dapat diketahui melalui reponsibilitas organisasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebijakan organisasi dan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP, terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 sekarang ini. Responsibilitas yang diberikan dapat dinilai dari proses pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakkukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat di Desa Marannu sudah berjalan sesuai prosedur yang ada.

Responsibilitas berhubungan dengan pelaksanaan penilaian atau evaluasi terkait standar pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar yang telah dibuat tepat dengan situasi dan kondisi. Responsibilitas ini dapat diketahui berdasarkan pelaksanaan kegiatan organisasi yang telah seusai dengan mekanisme kerja dan prosedur kerja yang ada. Penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat dimasa pandemi covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros dilakukan berdasarkan pada aturan hukum yang ada.

Data penerima bantuan sosial tunai dibuat dan diberikan langsung oleh pemerintah pusat dan selama kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai tersebut berlangsung Dinas Sosial membantu dan memantau kelancaran kegiatan tersebut dan dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditentukan bahkan lebih dari itu. Artinya responsibilitas Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai ini sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai konsep dasar untuk dapat melihat konsisten atau tidaknya suatu organisasi publik terhadap kehendak atau harapan masyarkat. Suatu kinerja tidak harus dinilai berdasarkan besaran hasil yang dikembangkan organisasi dalam pencapaian targetnya, melainkan juga harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Akuntabilitas dapat dilihat dari seberapa besar manfaat yang diberikan suatu kebijakan atau program pemerintah kepada masyarakat. dengan demikian kinerja organisasi publik juga dinilai jika dilihat dari sisi eksternalnya dan tifak hanya melihat dari sisi internal. Suatu organisasi memiliki tingkat akuntabiliras yang tinggi apabila kebijakan maupun kegiatan sudah naik dan benar serta sudah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di mayarakat.

Akuntabilitas kinerja di Kantor Dinas Sosial dalam penyaludran dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros dimasa pandemi covid-19 belum menunjukkan kinerja yang maksimal dikerenakan adanya data yang tidak valid dimana menggunakan data yang berbasis data pada tahun 2017 sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) ada yang tidak menerima bantua social.

Dinas Sosial melakukan perbaikan data tapi tidak semua data yang diperbaiki tersebut diterima dan diperbaharui oleh pemerintah pusat. Penerima bantuan sosial ini barasal dari data yang diambil dari DTKS yang merupakan masyarakat yang tidak menerima bantuan lain seperti bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLS), bantuan pangan non tunai atau pun penerima bantuan lainnya. Data penerima bantuan sosial diberikan secara langsung dalam bentuk tunai kepada masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang terdampak covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan yang didasarkan pada aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas maka ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan social kepada masyarakat di desa Marannu Kabupaten Maros belum sepenuhnya menunjukkan kinerja yang maksimal karena dari aspek akuntabilitas ada data yang tidak valid sebab menggunakan data tahun 2017 sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai ada yang tidak menerima bantuan social. Data lama tersebut berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah

Kementerian Sosial, namun Dinas Sosial Kabupaten Maros seharusnya tidak berpatokan dengan data lama dan Dinas seharusnya menyiapkan data terbaru terkait bantuan social agar penyaluran bantuan bisa merata.

REFERENSI

Aditama Pria Bintang, W. N. (2017). Analisis kinerja organisasi pada kantor Kecamatan Blora. Journal Public Policy and Manajement Review, 6 (2). https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15994 [on line]

Anriza Julianry, Rizal Syarief, & M. J. A. (2017). Pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan serta kinerja organisasi kementerian komunikasi dan informatika. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 3 (2).

Barlian, E. (2016). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sukabina Press.

Huti, H. J. (2020). Analisis kinerja pegawai pada bidang umum dan pegawai pada kantor dinas kesehatan pangan dan pertanian Kabupaten Mahakam Ulu. Jurnal Administrasi Publik, 1 (2).

Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1– 27. https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp006.pdf [on line]

Irvan Junianto, Isabella, N. K. (2020). Analisis kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 5 (1).

Macella, A. D. R. (2020). Kinerja organisasi publik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di kantor Kecamatan Johan Pahlawan. Journal Public Policy, 6 (1).

Muthiah, N. (2021). Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi. Policy Assessment Journal. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2021/06/PolicyAssesment-TII-2021-Studi-Implementasi-BST-Nisaaul-Muthiah.pdf [on line]

Ni Kadek Suryani, J. E. H. J. F. (2018). Kinerja organisasi. Deepublish.

Rahajeng, A. D. (2018). Analisis pengukuran kinerja organisasi publik dengan pendekatan value for money (studi kasus di dinas pendidikan Kabupaten Sleman). Universita Santa Dharma Yogyakarta.

Statistik, B. P. (2020). Penerima bantuan sosial tunai (BST). Jurnal Badan Pusat Statistik. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8626

Sulfiani,Andi Ni'mah.(2019). Kinerja Pegawai Di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo. Jurnal I La Galigo Public Administration Journal. Hal 30-37.